

BAB I

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tekanan yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Iran dalam kaitannya dengan kebijakan nuklir Iran. Dimana Amerika Serikat beranggapan bahwa program nuklir yang dibangun oleh Iran adalah bertujuan militer sebagai pembuatan senjata penghancur massal yang kemudian dapat mengganggu keamanan internasional. Akan tetapi, secara langsung melalui pidato presiden Iran Ahmadinejad mengatakan bahwa, nuklir yang dibangun tersebut bertujuan damai. Yaitu sebagai energi alternatif pembangkit tenaga listrik. Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan teori Devensif Realism sebagai upaya untuk menjelaskan mengapa Iran tetap mampu mempertahankan kebijakan nuklirnya ditengah tekanan tersebut. Kemudian peneliti menggunakan dua konsep pembantu dalam menjelaskan isu nuklir Iran yaitu Konsep kepentingan nasional dan konsep kebijakan luar negeri.

A. Latar Belakang

Iran adalah negara dengan posisi regional yang signifikan baik secara regional maupun secara internasional. Populasi diperkirakan mencapai 70 juta, dan terletak dipersimpangan antara Asia Tengah, Asia Barat dan Asia Selatan, serta teluk Persia. Iran juga memiliki cadangan gas kedua terbesar di dunia yaitu 15 persen dari total keseluruhan cadangan gas di dunia. Dan memiliki cadangan minyak terbesar yaitu 9 persen dari total keseluruhan cadangan minyak di dunia. Meskipun demikian, sumber daya energi Iran sebenarnya berada dalam kondisi tua dan membutuhkan perbaikan serta peningkatan. Secara substansial, industri energi Iran sulit berkembang. Hal ini disebabkan keterbatasan akses pada investasi luar negeri akibat sanksi ekonomi unilateral Amerika Serikat yang diterapkan sejak 1995. Produksi minyak Iran bahkan tidak mampu menyamai jumlah 5,5 juta barel per-hari pada masa sebelum revolusi Islam. Kemampuan produksi ini dihadapkan pada kebutuhan domestik yang semakin meningkat terutama digunakan sebagai listrik yang mencapai 280 persen semenjak Revolusi 1979. Kebutuhan akan pasokan listrik yang mendesak, tingginya tingkat konsumsi dalam negeri, minyak dan gas sebagai

sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, dan nuklir sebagai sumber alternatif, memposisikan nuklir sebagai bagian dari kepentingan nasional Iran (Pramata & Aji, 2008).

Sebagai negara yang hidup dalam tekanan embargo sejak tahun 1979 pasca revolusi Islam, Iran kembali menjadi pembicaraan dunia internasional setelah Mahmoud Ahmadinejad terpilih sebagai presiden. Ahmadinejad yang memimpin Iran sejak tahun 2005 telah membuat wilayah Timur Tengah kembali menjadi perhatian khusus negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, Israel. Sebagai seorang konservatif garis keras yang berpegang teguh padah nilai-nilai semangat revolusi, Ahmadinejad yang vokal menyuarakan anti Barat membuat peperangan hampir terjadi antara Israel dan Iran. Pemikiran politik yang terealisasi pada kebijakan-kebijakan politik radikal, revolusionis dan populis mengakibatkan popularitas Iran meningkat setelah beberapa dekade yang sempat meredup. Hal tersebut membuat Iran dijatuhi embargo yang lebih berat. Sikap Ahmadinejad yang keras tentang permasalahan hak Iran untuk mengembangkan nuklir damai membuat kondisi internal negeri Mullah tersebut terisolasi (Lestari & Yuniyanto, 2013).

Pada masa sebelum pemerintahan Ahmadinejad, yaitu pada masa Khatami penolakan terhadap penghentian program nuklir tidak sebesar sebagaimana yang dilakukan pada masa Ahmadinejad. Ahmadinejad bergerak dengan cepat untuk memulai kembali program nuklir Iran yang sempat terhenti . sejak diangkat sebagai presiden Iran, Ahmadinejad sering sekali menegaskan program nuklir yang dikembangkan Iran bertujuan damai. Oleh karena itu itu, Iran tidak akan sedikitpun memperlambat atau menunda pengembangan nuklir yang dilakukannya, hal ini kemudian disetujui oleh kepala negosiator nuklir Iran Sirus Naseri dan Hoseyn Musyaian yang menyatakan Iran akan tetap melanjutkan program pengayaan Uranium jika dalam proposal negosiasi yang diajukan Uni Eropa tidak menyatakan klausul pembukaan kembali pengayaan Uranium. Setelah aksi pemerintahan Ahmadinejad yang membuka kembali fasilitas pengayaan Uranium di Natanz, dunia internasional menanggapi dengan menyatakan komplain dan seketika meminta diadakan negosiasi ulang mengenai penangguhan program nuklir Iran tersebut (Muzainiyeh, 2016).

Perdebatan masalah nuklir antara kedua negara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap baru, sejak tahun 2003 yaitu sejak program nuklir Iran mulai diketahui oleh masyarakat luas dimana sebelumnya dikembangkan dengan secara rahasia. Pada bulan September 2003

International Atomic Energy Agency atau biasa disebut IAEA yang dipimpin oleh Mohammad El Baradei melakukan kunjungan ke Iran untuk meninjau langsung program nuklir Iran. Dalam kunjungan tersebut, IAEA menyatakan kegagalan Iran dalam menjalankan perjanjian keamanan terkait program nuklir yang mereka miliki. Kegagalan tersebut disebabkan beberapa faktor di antaranya desain bangunan dan konstruksi fasilitas milik Iran yang baru dibangun dan tidak adanya laporan terkait dengan pengelolaan dan impor uranium ke IAEA. Namun tetap saja Iran melanjutkan program nuklir tersebut. Terpilihnya Ahmadinejad pada tanggal 3 Agustus 2005 kemudian mengumumkan keberlanjutan program nuklir bahwa mereka memulai kembali konversi nuklir dan menekankan bahwa program nuklir mereka adalah untuk kepentingan damai. Pada saat itu pula, IAEA menyatakan bahwa Iran telah melanggar perjanjian non-proliferasi. Atas dasar ini Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya menuduh Iran gagal mematuhi prosedur keamanan. Oleh karena itu, AS berusaha menghentikan program nuklir Iran, akan tetapi dilain pihak, pemerintah Iran menolak untuk menghentikan program nuklirnya (Zulfikar, 2013).

Israel adalah satu-satunya Negara non Islam di kawasan Timur Tengah selalu merasa terancam bila ada Negara lain memiliki kekuatan militer cukup besar, termasuk bila mempunyai potensi kekuatan nuklir. Iran sebagai Negara yang sudah membangun teknologi nuklir sejak lama kemudian menjadi ancaman nyata bagi Israel dan kemudian berhasil mengajak Amerika Serikat untuk menekan Iran. Amerika Serikat menggunakan pengaruhnya pada politik internasional untuk bisa memberikan sanksi kepada Iran melalui PBB. Amerika Serikat sangat bersikeras bahwa nuklir yang dikembangkan oleh Iran tidak hanya sebagai pembangkit tenaga listrik saja tapi juga untuk kepentingan militer. Meskipun aktivitas nuklir Iran telah diawasi oleh IAEA (*International Atomic Energy Agency*) dan tidak melanggar NPT (*Non Proliferation Treaty*), Negara-negara Barat tetap saja melakukan intervensi terhadap pengembangan nuklir Iran (Akbar, Hikmatul, & Kodimerinda, 2018).

Iran merupakan negara yang diintervensi oleh Amerika Serikat dalam masalah program Nuklir, namun demikian, Iran dibawah pimpinan Ahmadinejad tidak menginginkan negaranya diintervensi oleh Amerika, terutama dalam masalah pengembangan program nuklir. Sementara Bush sendiri beranggapan semua negara Timur Tengah harus diteliti oleh agen IAEA dalam pengembangan energi nuklir serta kekuatan militernya. Namun pada kenyataannya, Amerika Serikat dan negara-negara yang tergabung dalam kelompok P5+1 (Amerika, Inggris, Cina,

Prancis, Rusia, dan Jerman) sempat mengundang Iran untuk melakukan pembahasan sanksi program nuklir dan menekan negeri itu untuk bernegosiasi dengan negara-negara yang telah meratifikasi NPT pada tahun 2006 (Yoshitomo & Aldino, 2017).

Satu-satunya negara di Timur Tengah yang memiliki potensi dalam pengembangan program nuklir. Aktivitas Iran yang menarik perhatian dunia adalah program nuklir Iran. Program nuklir ini dikembangkan sejak pra-Revolusi Islam tepatnya pada tahun 1957. Aktifitas nuklir Iran bermula sejak Iran mengesahkan pendirian Pusat Atom Universitas Teheran pada tahun 1956 yang disusul oleh perjanjian perdana tentang kerjasama nuklir antara Iran dan Amerika Serikat. Program Nuklir Iran dibangun dengan tujuan damai. Hal ini diperkuat dengan adanya perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Iran dan *Internasional Atomic Energy Agency (IAEA)* serta *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)*. Berdasarkan pasal keempat NPT, Iran berhak menggunakan teknologi nuklirnya untuk kepentingan damai (Ni'matul & Mahmudah, 2017).

Program nuklir ini dibentuk bertujuan untuk membuka pintu investasi Amerika Serikat di Iran dalam bidang industri nuklir sipil untuk perawatan kesehatan dan obat-obatan. Program ini mendapat dukungan secara langsung dari pihak Amerika Serikat yang ditandai atas program atom oleh AS untuk bertujuan damai (*U.S atoms for peace*). Kegiatan ini mulai beroperasi pada tahun 1967 ketika didirikannya pusat pengembangan penelitian nuklir Tehran *Tehran Nuclear Research Center (TNRC)* dibawah pengawasan energi atom Iran (*Atomic Energy Organization of Iran AEOI*). Amerika Serikat lebih menilai pengembangan program nuklir Iran sebagai langkah awal dalam pengembangan nuklir dan keperluan dibidang militer. Kecurigaan Amerika Serikat dimulai pada tahun 1979 pada saat kejatuhan Reza Pahlevi atas kejadian *Islamic Revolution* dan akhirnya terjadi pemutusan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dengan Iran dalam pengembangan teknologi nuklir serta didasari oleh pemikiran bahwa Iran adalah negara pendukung gerakan terorisme di dunia. Semenjak masa pemerintahan George W. Bush dan Barrack Obama, AS sering memberikan sanksi embargo bagi Iran (Yoshitomo & Aldino, 2017).

Hubungan Iran dan Amerika Serikat pernah terjalin cukup erat pada masa monarki Shah Reza Pahlevi, dengan meletusnya revolusi Islam Iran Februari 1979, menandai berakhirnya kekuasaan Reza Pahlevi, yang berarti berakhir pula hubungan erat Amerika Serikat dan Iran. Hubungan yang sangat erat antara Iran dan AS pada masa Shah, berbalik 180 derajat begitu Khatami muncul sebagai penguasa baru Iran. Khatami dan para pendukung menganggap Shah

sebagai “boneka Amerika” mereka mengidentikan Shah dengan AS dan sebaliknya, AS diidentikan dengan Shah. di era Khatami, Iran menganut politik luar negeri non-Blok, atau menurut istilah mereka “*laa Syarqiyyah, laa gharbiyyah*” (tidak Timur, tidak Barat). Namun pada prakteknya kebencian pemerintah Khatami terhadap AS, lebih besar dari pada negara-negara manapun hal ini disebabkan begitu banyak campur tangan Amerika Serikat terhadap Iran. Begitu juga dari pihak AS, terjadinya revolusi Iran Imam Khatami menjuluki AS sebagai “Setan Besar”. Amerika Serikat dengan berbagai cara menuduh Iran sebagai penyebab memburuknya situasi keamanan di Timur Tengah, khususnya di kawasan Teluk, setiap terjadi aksi terorisme atau adanya partai Islam di kawasan tersebut, AS selalu menuduh Iran sebagai pelaku utama (Putri & Eni, 2016).

Pengembangan program Nuklir dijadikan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik Iran. Pemberdayaan teknologi nuklir ini menjadi sangat penting sebagai pembangunan di berbagai bidang seperti Ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan teknologi. Selain Iran, sudah banyak negara yang mulai menggunakan teknologi nuklir sebagai sumber energi, pada masa selanjutnya diperkirakan teknologi akan menggantikan bahan bakar fosil sebagai pembangkit sumber energi nuklir. Kerjasama antara Iran dan Amerika Serikat berlangsung pada masa rezim Shah Reza Pahlevi. Hingga tahun 1971, Shah telah berhasil menjalankan sejumlah kerjasama nuklir dengan beberapa negara Eropa lain seperti Jerman untuk pembangunan reaktor Bushehr, Perancis untuk memproduksi sekitar 23 megawatt listrik pada reaktor Darkhoin, Amerika Serikat sebagai pemasok bahan bakar nuklir dan pembelian saham perusahaan Ordif. Kerjasama Iran dan negara-negara Barat hanya berlangsung hingga kejatuhan rezim Shah Mohammad Reza Pahlevi. Setelah Iran berubah menjadi Republik Islam Iran, negara-negara Barat mulai menghentikan kerjasamanya. Selanjutnya, Iran mulai mencari mitra kerja baru dan mulai menjalin kerjasama dengan negara lainnya untuk melanjutkan program nuklir tersebut. Namun kerjasama tersebut terpaksa dibatalkan oleh negara-negara yang menjadi mitra baru Iran karena kuatnya tekanan Amerika Serikat dan negara-negara Barat (Ni'matul & Mahmudah, 2017).

Banyaknya tekanan yang dilakukan Barat kepada Iran dengan tujuan agar Iran menghentikan program nuklirnya, tekanan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan UE-3 diantaranya, 1) melakukan embargo ekonomi dan mengeluarkan ancaman serangan militer terhadap Iran. 2) mengancam dan memberikan sanksi kepada negara manapun yang menanamkan

investasi di Iran dalam jumlah besar. Menanggapi sanksi Dewan Keamanan PBB tersebut, pemerintah Iran mengancam menggunakan senjata apapun untuk mempertahankan diri, termasuk ekspor minyak, sebagai senjata dalam menghadapi tekanan internasional terhadap program nuklir Iran. 3) Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya terus menghembuskan isu-isu bahwa proyek nuklir sipil Iran hendak dibelokkan menjadi proyek senjata nuklir. Meskipun tim inspeksi IAEA mengatakan bahwa tidak ada penyimpangan sedikitpun dari proyek nuklir Iran. Problematika yang terjadi antara Iran dengan negara-negara Barat juga diisukan karena negara Iran merupakan salah satu negara Islam yang memiliki kapasitas teknologi nuklir, sebagaimana yang diketahui oleh kebanyakan orang bahwa negara-negara Barat dan Amerika Serikat melontarkan banyak label negatif yang diarahkan kepada aktivitas di dunia Islam. Seperti label “Fundamentalis” yang mengarah kepada ghirah kebangkitan Islam, dan label “Bom Islam” yang mengarah pada aktivitas pengembangan teknologi nuklir yang ada di wilayah Islam seperti Pakistan, Iran dan negara-negara Islam lainnya (Ni'matul & Mahmudah, 2017).

Pasca wafatnya Imam Khatami pada tahun 1989, perlawanan terhadap Amerika Serikat mulai berkurang. Pemimpin baru Iran berupaya untuk mencoba membangun kembali hubungan Iran-AS. Yaitu dengan terpilihnya Presiden Mohammad Khatami untuk masa jabatan 1997-2005 dengan pendekatan modernis-moderat dalam pemerintahannya. Presiden Khatami adalah Presiden yang moderat. Presiden dengan slogan toleransi, modernisme dan keterbukaan. Slogan ini yang menjadi pandangan politik luar negerinya. Khatami berupaya untuk menerapkan kebijakan peredaan ketegangan dan mengutamakan dialog dan kerjasama. Begitu juga dengan hubungan Iran dan Amerika Serikat, Khatami berusaha menciptakan hubungan yang lebih baik melalui sebuah “Dialog Peradaban” dengan Amerika Serikat. Peluang ke arah perbaikan hubungan dengan AS selalu dilakukan oleh Khatami. Bahkan lewat isu nuklir yang kembali meresahkan Amerika Serikat. Keputusan Iran untuk menghentikan program nuklirnya di masa Khatami menjadi nilai plus dalam usaha perbaikan hubungan Iran dan Amerika Serikat. Keputusan ini menguntungkan Iran, setidaknya Iran dibawah pemerintahan Khatami dianggap sebagai negara yang mau diajak berunding. Kepercayaan dunia Internasional terhadap Iran mulai terbangun (Putri & Eni, 2016).

Pada 11 Januari 2006, Ahmadinejad menyatakan bahwa Iran akan mengembangkan teknologi nuklir damai untuk mengacu kemajuan dan perkembangan bangsa Iran. Nuklir yang dikembangkan oleh Iran bukan untuk membuat bom nuklir yang dituduhkan Amerika Serikat

beserta para sekutunya tersebut. Pada April 2006, Ahmadinejad mengumumkan bahwa Iran sudah berhasil melakukan pengayaan uranium, untuk selanjutnya diteliti lebih jauh lagi mengenai kemungkinan pengalihannya menjadi bahan bakar nuklir. Ahmadinejad kemudian menjelaskan bahwa teknologi nuklir Iran untuk tujuan damai dan tidak memiliki ancaman kepada berbagai pihak. Penjelasan Ahmadinejad ini dilakukan sebagai langkah antisipatif guna menangkal penilaian negatif publik dunia atas program pengembangan nuklir Iran (Saragih & Maujana, 2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: "Mengapa Iran tetap menjalankan program nuklirnya ditengah tekanan Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Ahmadinejad ditahun 2005-2015?"

C. Kerangka Pemikiran

1. Teori Defensive Realism

Neorealisme defensif adalah teori struktural yang diambil dari aliran realisme dalam teori hubungan Internasional. Neorealisme berakar dari *Theory of International Politics* karya Kenneth Waltz. Waltz berpendapat bahwa dalam sistem internasional yang anarki mendorong negara untuk mempertahankan kebijakan moderat dan isolasionis demi menciptakan keamanan (Waltz K. N., 1979). Iran di era kepemimpinan Ahmadinejad tetap mempertahankan kebijakan nuklir mereka meskipun mendapat tekanan sanksi embargo oleh Amerika Serikat sejak tahun 1979. Hal ini disebabkan nuklir merupakan energi alternatif bagi Iran sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Amerika Serikat dan negara-negara Barat terus menerus menekan Iran agar menghentikan program nuklirnya.

Tekanan yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya diantaranya, melakukan embargo ekonomi dan mengeluarkan ancaman militer terhadap Iran. Mengecam dan memberikan sanksi kepada negara manapun yang menanamkan investasi di Iran dalam jumlah besar. Dalam menanggapi hal ini, pemerintah Iran akan menggunakan senjata apapun untuk mempertahankan diri sebagai bentuk menjaga keamanan nasional dari Intervensi Amerika Serikat dan sekutunya.

Waltz juga berpendapat bahwa struktur internasional dapat mempengaruhi kepentingan nasional dan perilaku sebuah negara yang kemudian hal ini mempengaruhi hubungan luar negeri negara tersebut (Maksum & Bustami, 2013)

Demikian halnya, Amerika Serikat dan sekutunya menjatuhkan berbagai sanksi kepada Iran disebabkan Iran tidak mau menghentikan program nuklirnya. Amerika Serikat sendiri beranggapan bahwasannya, Nuklir yang dikembangkannya Iran adalah bukan untuk membuat senjata penghancur massal yang dapat mengganggu dan mengancam sistem keamanan internasional. Tetapi Iran di era Ahmadinejad tetap memprioritaskan nuklir sebagai kebijakan luar negeri. Karena, Iran sendiri telah mendeklarasikan bahwa nuklir yang dikembangkan adalah untuk kepentingan nasional Iran sendiri bukan untuk senjata pemusnah massal.

Hubungan Iran dengan Amerika Serikat tidak berjalan dengan harmonis. Iran dan Amerika Serikat memutuskan hubungan diplomatik. Begitupun dengan negara-negara yang sebelumnya bekerjasama dengan Iran dalam pengayaan uranium terpaksa menghentikan kerjasama tersebut karena begitu besarnya pengaruh Amerika Serikat dalam sistem internasional. Hal tersebut, menjadikan Iran khususnya era Ahmadinejad tidak menginginkan adanya intervensi Barat sama sekali.

Dalam menjelaskan rumusan masalah “mengapa Iran tetap menjalankan program nuklirnya” maka teori defensif ini akan dibantu oleh dua konsep dalam menjawab permasalahan yaitu konsep kepentingan nasional dan konsep kebijakan luar negeri. Konsep kepentingan nasional melihat kondisi domestik yang kemudian menjadi tolak ukur atau dasar diterapkannya kebijakan luar negeri Iran yang nuklir sebagai prioritas Ahmadinejad. Konsep kebijakan luar negeri melihat bagaimana Iran dapat mempertahankan program nuklir tersebut dengan peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral bersama negara lain yang pada akhirnya membuat Iran mampu menjalankan program nuklir dibawah kepemimpinan Ahmadinejad pada tahun 2005-2015.

2. Konsep kepentingan nasional

Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Lazimnya kepentingan nasional pada tiap negara/bangsa adalah keamanan yang mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah serta kesejahteraan. Kedua hal

pokok ini merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi tiap negara (Rudy & Teuku, 2002). Dalam hal ini kepentingan nasional tidak hanya dilihat dari prespektif keamanan, tetapi juga dari prespektif kesejahteraan. Dari kedua prespektif tersebut, kepentingan nasional juga dapat dipahami sebagai sebuah upaya pemenuhan terhadap hal-hal yang signifikan bagi kelangsungan hidup suatu negara. Program nuklir Iran dapat dilihat sebagai sebuah bentuk kebijakan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan kesajahteraan. Keberadaan nuklir sebagai sumber energi alternatif untuk memenuhi pasokan listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat Iran. Namun dapat dilihat, program nuklir tersebut dapat juga dilihat melalui prespektif dalam menghadapi ancaman dari tekanan Amerika Serikat dan negara-negara Barat.

Hubungan internasional membicarakan mengenai kepentingan nasional negara-negara yang terlibat didalamnya. Bagaimana kepentingan nasional tersebut saling bersinggungan dan berinteraksi serta bagaimana suatu negara berusaha untuk menjaga kepentingan nasionalnya dengan demikian dunia internasional adalah sebuah arena dimana banyak sekali kepentingan nasional berusaha dijaga atau diwujudkan oleh aktor internasional. Dalam konteks Internasional kepentingan negara tercerminkan dalam kebijakan luar negeri negara-negara tersebut.

Berdasarkan pemikiran mengenai posisi kepentingan nasional sebagaimana dijelaskan diatas, dalam menelaah program nuklir Iran, perlu memahami program nuklir Iran tersebut sebagai kepentingan nasional yang memiliki arti strategis bagi Iran sebagai suatu negara. Didukung fakta bahwa Iran membutuhkan nuklir untuk memenuhi kebutuhan energinya sebagai instrumen penting bagi pembangunan dan perkembangan Iran dalam jangka panjang.

3. Konsep kebijakan luar negeri

Kebijakan luar negeri adalah tindakan negara terhadap lingkungan eksternal serta berbagai kondisi domestik yang menopang formulasi tindakan serta perhatiannya terhadap kepentingan nasional negara serta variabel yang mempengaruhi pilihan dan teknik yang digunakan untuk mencapainya. (Jaakko & Holsti, 1972). Iran menerapkan kebijakan luar negeri dengan terus mengembangkan program nuklirnya. Iran masuk dalam kelompok negara *Non-Profilerasi Treaty* (NPT) sejak tahun 1970. Menurut pemerintahan Iran, semua aktifitas nuklirnya dimaksudkan untuk tujuan damai. Alasan utama Iran melakukan kembali pengayaan Uranium tenaga nuklir

untuk memenuhi suplai energi masyarakatnya, dengan menggunakan nuklir sebagai energi alternatif, Iran dapat menghemat bahan bakar fosil yang semakin menipis jumlahnya.

Iran melakukan ratifikasi terhadap perjanjian non-proliferasi nuklir yang dikenal dengan NPT (*Non-Proliferation Treaty*). Ratifikasi tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah Iran dalam menjelaskan dan meyakinkan posisi program nuklir Iran sebagai program nuklir yang bertujuan damai. Dengan menjadi anggota NPT dan meratifikasi terhadap NPT, program nuklir Iran merupakan program nuklir dengan status yang sah. Dalam menganalisa program nuklir Iran, perlu dipahami mengenai dinamika NPT dalam konteks politik internasional, dimana rezim NPT secara luas diterima sebagai tolak ukur upaya-upaya internasional untuk menghentikan penyebaran senjata nuklir dan kemungkinan-kemungkinan bahaya yang dapat ditimbulkannya. Akan tetapi NPT juga memiliki tujuan untuk memastikan bahwa energi nuklir tersebut digunakan untuk tujuan damai dan kesejahteraan sosial untuk seluruh negara/bangsa, sekaligus sebagai saran untuk mengontrol peluncuran senjata nuklir dan peluncutan senjata (Pramata & Aji, 2008).

Iran mempresepsikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebagai hegemoni yang intimidatif dan juga sebagai sumber instabilitas. Dengan demikian Iran memformulasikan politik luar negerinya secara independen dan tidak tergantung pada posisi Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak terlepas dari kepentingannya atas penguasaan sumber energi dan terkait masalah-masalah keamanan dengan program nuklir damai yang memiliki tujuan sipil baik secara ekonomi dan kesejahteraan, tapi masih sesuai dengan konsep NPT dan melalui program monitoring IAEA, Iran sekurang-kurangnya memiliki beberapa keuntungan sebagai penyeimbang bagi dominasi Amerika Serikat di kawasan sekaligus bagian dari upaya untuk membuktikan bahwa program nuklir Iran tidak memiliki tujuan militer, sehingga dapat mengurangi ketegangan di kawasan terutama diantara negara-negara tetangganya.

D. Hipotesa

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengajukan hipotesa seperti berikut:

1. Program nuklir Iran sebagai bentuk defensif dari tekanan internasional khususnya Amerika Serikat.

2. Program nuklir tetap dijalankan untuk menjaga kepentingan nasional yaitu kemandirian energi listrik.
3. Pemerintah Iran ingin membuktikan bahwa nuklir yang dikembangkan bukan untuk tujuan militer melainkan untuk tujuan damai.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan nuklir Iran di tengah tekanan Amerika Serikat dan negara-negara Barat pada masa kepemimpinan Ahmadinejad” ini terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yakni sebagai berikut:

1. Penulisan ini bermaksud untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah didapat oleh penulis selama mengikuti perkuliahan sebagai bentuk pendalaman ilmu.
2. Menjelaskan secara lebih mendalam mengenai kebijakan program nuklir Iran di tengah tekanan Amerika Serikat dan negara – negara Barat di era kepemimpinan Ahmadinejad pada tahun 2005-2015.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Kualitatif

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif karena menggunakan teori dan pola realitas yang telah terjadi sebagai cara untuk memahami serta menjawab permasalahan. Dalam sebuah penelitian kualitatif, pertanyaan, tujuan, dan hipotesa memberikan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan mencoba memberikan gambaran mengenai signifikansi program nuklir Iran yang bertujuan damai dan sebagai sumber energi alternatif dalam kepentingan nasional Iran, berjalan secara konsisten dan berkelanjutan oleh pemerintah Iran. Dan juga menganalisa program

nuklir Iran yang bertujuan damai tersebut sesuai dengan kerangka NPT dan program pengawasan IAEA, ditengah kecaman Amerika Serikat dan negara sekutunya yang berargumen bahwa program nuklir Iran bertujuan militer.

2. Pendekatan deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial secara lengkap *setting* sosial, dan juga hubungan yang terdapat dalam penelitian. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai program nuklir Iran. Penelitian ini berusaha mengobservasi secara menyeluruh dan mendalam beberapa peristiwa yang diteliti dalam periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini, kebijakan luar negeri pemerintah Iran terkait program nuklirnya akan diteliti dan dikaji secara lebih mendalam.

3. Teknik Pengumpulan data

Berdasarkan teknik pengumpulan data penelitian ini merupakan studi dokumen atau literatur. Studi dokumen adalah kebijakan yang dilakukan atas kebijakan-kebijakan negara yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan studi literatur adalah studi yang dilakukan untuk mengambil kembali dasar-dasar ilmiah dari tema yang hendak diangkat melalui peninjauan karya-karya ilmiah bertema serupa yang sebelumnya telah dilakukan oleh penelitian-penelitian lain. Melalui teknik literatur, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan literatur. Data yang dikumpulkan berasal dari artikel, jurnal politik internasional, surat kabar, dan juga melalui situs-situs internet yang masih relevan.

G. Jangkauan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis hanya membahas upaya-upaya pemerintah Iran di era kepemimpinan Ahmadinejad dari tahun 2005 hingga 2013 untuk tetap menjalankan program nuklirnya ditengah tekanan negara Barat, Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian latar belakang. 2005 menjadi awal tahun Ahmadinejad dipilih menjadi pemimpin

Iran tidak menginginkan adanya intervensi Amerika Serikat. Hingga pada tahun 2013, Iran melampaui batas pengayaan uranium dan melanggar kesepakatan nuklir.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dijabarkan dalam lima pembabakan :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Metodologi Penelitian, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penelitian.

2. Bab II Sejarah program nuklir dan penerapan *Non-Proliferation Treaty* (NPT) terhadap Iran

Bab ini menjelaskan mengenai sejarah program nuklir Iran dan penerapan NPT terhadap Iran.

3. Bab III Dinamika kebijakan Amerika Serikat dan beserta negara-negara Barat terhadap Program nuklir Iran

Bab ini berfokus pada kebijakan Amerika Serikat dan Iran bagaimana Amerika Serikat dan negara-negara Barat menekan program nuklir Iran, dengan menelaah latar belakang hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Bab ini juga membahas penerapan sanksi oleh Dewan keamanan PBB.

4. Bab IV Kebijakan nuklir Iran era Ahmadinejad dan tekanan internasional

Menjelaskan bagaimana Iran menerapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka upaya yang dilakukan untuk menjalankan program nuklirnya, Keterlibatan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Kebijakan luar negeri Ahmadinejad sebagai sebuah upaya untuk menghadapi tekanan Amerika Serikat, dan menjalankan kebijakan program nuklirnya sebagai sebuah kepentingan nasional.

5. Bab V Kesimpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada penulisan skripsi.